

TESIS
POLITIK HUKUM PENYUSUNAN PERDA DIY
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GIGUSA ELLA

Nomor Mahasiswa : 115201709

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Gigusa Ella
Nomor Mahasiswa : 115201709
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Politik Hukum Penyusunan PERDA DIY Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Pembimbing

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Tanggal

11/11 - 19

Tandatangan

Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

11/11 - 19



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama Mahasiswa : Gigusa Ella
Nomor Mahasiswa : 115201709
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : POLITIK HUKUM PENYUSUNAN PERDA DIY
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Pengaji	Tanggal	Tanda tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Ketua Pengaji)	11/11/19	
Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. (Anggota)	11/11/19	
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. (Anggota)	11/11/19	



Ketua Program Studi
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : GIGUSA ELLA

No. MHS : 115201709

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Politik Hukum Penyusunan PERDA DIY Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa

Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya, kecuali kutipan dari buku-buku, penulis telah memberitahukan sumbernya.

Yogyakarta, Oktober 2019

GIGUSA ELLA

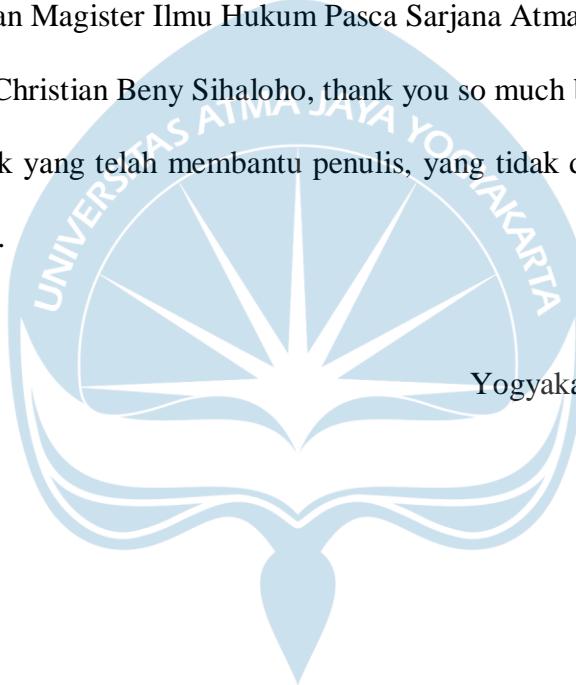
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selama ini melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Politik Hukum Penyusunan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis banyak memperoleh bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan Tesis. Bantuan berupa bimbingan, dukungan, masukan, saran, maupun doa, selalu menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis. Dengan demikian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. dan Bapak Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan saran serta ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menempuh proses perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluargaku tercinta yang selalu mendorong dan mendoakan untuk kelancaran penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Atmajaya Yogyakarta.
8. Almarhum Christian Beny Sihaloho, thank you so much big bro.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Yogyakarta, Oktober 2019

Penulis

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum serta kendala - kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala - kendala dalam penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, hal itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap perubahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka telah dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata - Kata Kunci : Politik Hukum, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Abstraction

The thesis aims to find out and examine legal politics as well as constraints and efforts to resolve constraints in the preparation of Daerah Istimewa Yogyakarta Regional Regulation Number 3 Year 2017 concerning the Implementation of Government Affairs which Become the Authority of Daerah Istimewa Yogyakarta.

Since the promulgation of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, brought many changes in the administration of government, one of which is the division of regional government affairs. Therefore, it also has a legal effect on changes in the administration of government affairs by the Daerah Istimewa Yogyakarta Government.

To realize legal certainty in the administration of concurrent governmental affairs which are the authority of the Daerah Istimewa Yogyakarta Government, a Daerah Istimewa Yogyakarta Regional Regulation Number 3 Year 2017 concerning the Implementation of Government Affairs Becoming the Authority of the Daerah Istimewa Yogyakarta has been established.

Key Words : Political Law, Regional Regulations, Administration of Government Affairs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAAN

KATA PENGANTAR

INTISARI

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Sistematika Laporan Penelitian	11

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum.....	13
1. Pengertian Politik Hukum.....	13
2. Politik Hukum Perundang – Undangan.....	25
3. Peraturan Perundang – Undangan Yang Baik.....	28
B. Pembentukan Norma Hukum Daerah.....	33
1. Norma Hukum Daerah.....	33

2. Tinjauan Umum Pembentukan Hukum Daerah.....	37
3. Peraturan Mengenai Pembentukan Norma Hukum Daerah Dalam Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.....	53
C. Landasan Teori.....	60
1. Teori Stufenbau.....	60
2. Teori Kebijakan.....	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Sumber Data.....	65
C. Nara Sumber.....	67
D. Metode Pengumpulan Data.....	67
E. Metode Pengolahan Data.....	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	69
B. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	95
C. Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

